

Kepemimpinan Etnik dan Ketegangan Sosial di Desa Suka Mandi Hilir

Nur Iza Dora¹, Damai Yanti Tambunan², Rizka Vista³, Alfiah Taliba Lubis⁴, Sarah Nadia Hsb⁵

Univeristas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: nurizadora@uinsu.ac.id

Article History:

Received: 12 Juli 2025

Revised: 01 Agustus 2025

Accepted: 07 Agustus 2025

Keywords: *Ethnic Leadership, Interethnic Forum; Multiculturalism, Social Exclusion, Social Tension.*

Abstract: *This research analyzes ethnic leadership in Suka Mandi Hilir Village and its influence on emerging social tensions among residents. The main objective of this study is to understand how village leaders from majority ethnic groups manage interethnic relationships and address potential conflict in a multicultural setting. The primary method used was a descriptive qualitative approach involving in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The findings indicate that unequal representation in leadership contributes to feelings of social exclusion among minority groups, particularly during village head elections. However, the village head's efforts through interethnic social programs and the role of religious leaders and women's prayer groups proved effective in mitigating conflict and fostering social cohesion. Village forums remain symbolically exclusive, thus requiring communication reform to ensure equal participation among all residents.*

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat multikultural yang terdiri dari berbagai etnis, agama, bahasa, dan kebudayaan. Keberagaman ini menjadi ciri khas sekaligus tantangan tersendiri dalam kehidupan sosial, terutama di tingkat desa yang merupakan satuan masyarakat terkecil dan paling dinamis. Di beberapa wilayah, perbedaan etnis bukan hanya menjadi kekayaan budaya, melainkan juga berpotensi memunculkan friksi sosial, terutama ketika bersinggungan dengan distribusi kekuasaan dan kepemimpinan lokal. Salah satu desa yang mencerminkan dinamika ini adalah Desa Suka Mandi Hilir, yang dihuni oleh beragam kelompok etnis seperti Batak, Jawa, Mandailing, dan Melayu.

Dalam konteks kepemimpinan desa, peran kepala desa tidak hanya sebagai pengelola administrasi, melainkan juga sebagai penghubung antarwarga dengan latar belakang etnis yang berbeda. Menurut Hofstede (2011), pemimpin yang efektif dalam masyarakat multikultural harus memiliki sensitivitas budaya, kemampuan negosiasi lintas identitas, dan pendekatan yang inklusif. Hal ini sejalan dengan pendapat Koentjaraningrat (2009) yang menekankan bahwa keberhasilan relasi sosial dalam masyarakat plural ditentukan oleh sejauh mana pemimpin mampu menjembatani perbedaan dan membangun dialog antarbudaya.

Penelitian ini tertarik untuk menelusuri bagaimana kepemimpinan etnik di Desa Suka

Mandi Hilir membentuk pola interaksi sosial dan mengelola potensi ketegangan antarwarga. Fokus utama terletak pada bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemimpin dari etnis tertentu dan bagaimana hal itu berdampak pada kohesi sosial dalam proses pemilihan, distribusi bantuan, hingga partisipasi warga dalam kegiatan desa. Dalam beberapa kasus, pemilihan kepala desa yang dipengaruhi oleh sentimen etnis kerap melahirkan gesekan sosial yang menyulitkan upaya pembangunan berbasis partisipatif.

Fenomena ini menjadi menarik karena memperlihatkan bahwa etnisitas tidak hanya menjadi identitas kultural, melainkan juga instrumen politik dan ekonomi yang dapat menimbulkan ketegangan ketika dikelola secara eksklusif. Menurut Chandra (2006), dalam masyarakat yang belum sepenuhnya terkonsolidasi secara sosial, etnis dapat dijadikan basis klaim terhadap sumber daya dan kekuasaan. Penelitian ini ingin membongkar bagaimana kondisi ini terjadi di tingkat desa, yang selama ini cenderung luput dari perhatian penelitian ilmiah skala makro.

Permasalahan yang muncul adalah adanya kesenjangan antara harapan terhadap kepemimpinan yang adil dan realitas politik etnik yang masih kuat memengaruhi proses sosial. Beberapa informan menyatakan bahwa pemimpin desa dianggap lebih memihak kepada kelompok etnis tertentu, khususnya dalam momen pemilihan kepala desa dan distribusi program desa. Ketegangan sosial juga muncul dalam bentuk ketidakpercayaan, eksklusi sosial, hingga kurangnya keterlibatan dalam forum publik. Hal ini menunjukkan adanya gap antara prinsip kesetaraan dan praktik sosial yang terjadi di lapangan.

Sebagai pendukung pemaparan kondisi di atas, berikut ini adalah **tabel yang menunjukkan persepsi warga terhadap kepemimpinan kepala desa berdasarkan etnis:**

Tabel 1. Persepsi Warga Terhadap Kepemimpinan dan Relasi Sosial Antar-Etnis di Desa Suka Mandi Hilir

No	Etnis Warga	Persepsi terhadap Pemimpin Desa	Partisipasi dalam Kegiatan Desa	Konflik Etnik yang Pernah Dirasakan
1	Batak	Positif, merasa terwakili	Tinggi	Rendah
2	Jawa	Negatif, merasa terpinggirkan	Sedang	Sedang
3	Melayu	Netral, namun pasif	Rendah	Tinggi (khusus saat pemilu)
4	Mandailing	Positif namun kritis	Tinggi	Sedang

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam persepsi dan partisipasi warga berdasarkan identitas etnik mereka. Warga dari etnis mayoritas cenderung memiliki persepsi positif dan tingkat partisipasi yang tinggi, sementara kelompok minoritas lebih rentan mengalami eksklusi sosial dan keterlibatan yang rendah.

Penelitian sebelumnya oleh Hidayat dan Nurmala (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan kepemimpinan desa dalam masyarakat multietnis sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemimpin tersebut mampu menerapkan prinsip keadilan distributif dan komunikasi lintas budaya. Namun, belum banyak penelitian yang fokus pada studi kasus yang spesifik dan berbasis data mikro, seperti yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Dengan demikian, terdapat gap penelitian yang perlu dijawab, terutama dalam konteks dinamika sosial-politik di desa dengan komposisi etnis yang plural.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dinamika

kepemimpinan etnik di Desa Suka Mandi Hilir; (2) mengidentifikasi bentuk-bentuk ketegangan sosial yang muncul akibat persepsi eksklusivitas kepemimpinan; dan (3) mengevaluasi strategi-strategi penyelesaian konflik sosial berbasis etnik yang dilakukan oleh pemimpin desa maupun tokoh masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritik dan praktis dalam pengelolaan multikulturalisme di tingkat lokal.

Kajian teoritik yang mendasari penelitian ini mencakup teori konflik sosial oleh Lewis Coser (1956), yang menjelaskan bahwa konflik muncul sebagai akibat dari kompetisi terhadap sumber daya dan kebutuhan identitas, serta teori multikulturalisme yang dikembangkan oleh Taylor (1994) dan Parekh (2000) yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap identitas kelompok minoritas dalam suatu masyarakat demokratis. Kombinasi teori ini akan menjadi pisau analisis dalam memahami dinamika sosial di Desa Suka Mandi Hilir.

Temuan awal dari wawancara dengan informan menunjukkan bahwa konflik etnik di desa ini tidak bersifat struktural dan permanen, namun lebih bersifat situasional, khususnya saat momen-momen politik. Meski demikian, apabila tidak dikelola dengan baik, konflik ini dapat berkembang menjadi ketegangan jangka panjang yang menghambat pembangunan dan kohesi sosial desa. Oleh karena itu, pendekatan budaya, relasi sosial yang setara, serta kepemimpinan yang akomodatif menjadi kunci dalam menciptakan perdamaian sosial.

Adapun harapan dari penelitian ini adalah menghasilkan pemahaman mendalam mengenai mekanisme sosial yang terjadi dalam masyarakat multietnik di tingkat desa, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis komunitas untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan lokal. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintahan daerah dan pengambil kebijakan dalam membangun strategi pembangunan desa yang inklusif dan adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, karena bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual, khususnya terkait dinamika kepemimpinan etnik dan ketegangan sosial di Desa Suka Mandi Hilir, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, 20551. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap makna subjektif, persepsi, serta pengalaman individu dalam realitas sosial mereka, yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif semata.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus kualitatif deskriptif, dengan fokus pada satu lokasi yang menjadi objek studi yaitu Desa Suka Mandi Hilir. Studi kasus dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial dan relasi kekuasaan antar kelompok etnik dalam satu komunitas tertentu.

Partisipan dan Informan

Penelitian ini melibatkan 5 informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan posisi strategis dan keterlibatan aktif mereka dalam dinamika sosial desa.

Tabel 2. Tabel Partisipan

Kategori Informan	Nama Informan	Usia	Etnis	Alasan Pemilihan
Informan Kunci	Bapak Sihotang	65	Batak	Kepala desa, pengambil kebijakan utama
Informan Utama	Merry Siahaan	43	Batak	Aktif dalam kegiatan politik dan sosial
	Buk Rani	55	Jawa	Warga senior, memahami dinamika

				sosial
Informan Pendukung	Bapak Rudi Harahap	50	Mandailing	Ketua RT, penghubung warga dalam konflik
	Ibu Aminah	60	Melayu	Tokoh pengajian, memberikan perspektif religius

Karakteristik partisipan meliputi variasi usia, jenis kelamin, peran sosial, dan latar belakang etnis yang mencerminkan keberagaman warga Desa Suka Mandi Hilir. Mereka dipilih berdasarkan keterlibatan aktif, pengalaman langsung, dan peran dalam menjaga maupun menanggapi isu sosial-etnik di desa.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
Instrumen yang digunakan berupa *panduan wawancara semi-terstruktur*, yang berisi 10–12 pertanyaan terbuka untuk menggali pengalaman, pandangan, dan strategi warga dalam menyikapi isu kepemimpinan dan ketegangan sosial. Validasi instrumen dilakukan melalui expert judgement dari dosen pembimbing dan praktisi sosiologi desa.
2. Observasi :
Peneliti melakukan observasi langsung terhadap kegiatan masyarakat seperti gotong royong, pengajian, dan rapat kampung untuk mengamati interaksi lintas etnis secara alami.
3. Dokumentasi:
Data sekunder dikumpulkan dari arsip desa, foto kegiatan masyarakat, notulen rapat warga, serta berita-berita lokal terkait pemilihan kepala desa.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman (2014) yang meliputi:

1. Reduksi Data: Menyeleksi dan menyederhanakan data yang relevan.
2. Penyajian Data: Menyusun dalam bentuk narasi, tabel, dan tematik visual.
3. Penarikan Kesimpulan: Mengembangkan makna, pola, dan proposisi dari data yang terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan lima subtema penting yang merepresentasikan kompleksitas kepemimpinan etnik dan ketegangan sosial di Desa Suka Mandi Hilir. Masing-masing subtema ini menjelaskan proses interaksi sosial, persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan desa, serta dinamika konflik horizontal berbasis etnik yang muncul, terutama dalam konteks politik lokal dan relasi sosial sehari-hari.

1. Kepemimpinan Kepala Desa dan Representasi Etnik

Kepemimpinan kepala desa dalam masyarakat multietnis memiliki peran krusial dalam menciptakan stabilitas sosial dan rasa keterwakilan bagi seluruh kelompok etnik. Di Desa Suka Mandi Hilir, posisi kepala desa saat ini dipegang oleh Bapak Sihotang yang berasal dari etnis Batak. Dominasi simbolik ini tidak hanya tercermin dari status formalnya sebagai pemimpin, namun juga dari persepsi masyarakat terkait siapa yang dianggap "lebih berhak" memimpin berdasarkan etnisitas.

Data wawancara menunjukkan bahwa persepsi terhadap kepemimpinan ini sangat

dipengaruhi oleh latar belakang etnik pemimpin. Warga dari kelompok etnis Batak, terutama yang memiliki keterlibatan dalam struktur sosial desa seperti panitia kegiatan dan BPD, cenderung menilai positif kepemimpinan Bapak Sihotang. Namun sebaliknya, kelompok dari etnis Jawa dan Melayu mengungkapkan perasaan tidak terwakili secara politis dan sosial.

Wawancara dengan Bapak Sihotang (Kepala Desa, 65 tahun, Batak):

“Sebagai kepala desa, saya memang dari etnis Batak, tapi saya selalu tekankan bahwa saya kepala desa untuk semua warga. Tapi tidak bisa dipungkiri, beberapa orang dari etnis lain kadang merasa tidak nyaman. Pernah ada warga dari etnis Jawa yang bilang ‘kami seperti tidak didengar suaranya di musyawarah’, padahal saya sendiri sudah usahakan semua bisa bicara. Saya juga sering libatkan tokoh dari etnis lain dalam musyawarah, tapi ya memang belum semua mau ikut aktif. Tapi saya tidak pilih-pilih, saya justru ajak mereka mendekat ke pemerintahan desa.”

Wawancara dengan Buk Rani (55 tahun, etnis Jawa):

“Saya rasa kepala desa sekarang ini lebih dekat ke orang-orang Batak saja. Kami dari Jawa ya merasa sedikit di luar lingkaran. Pernah waktu pembagian bantuan sosial, kok banyak yang dari Batak yang dapat duluan, padahal kami juga daftar. Mungkin itu kebetulan, tapi rasanya kok jadi kayak tidak adil. Kami tidak punya wakil juga di struktur desa, jadi ya siapa yang mau sampaikan suara kami?”

Wawancara dengan Ibu Aminah (Tokoh Majelis, Melayu):

“Saya lihat Pak Kades cukup aktif dan terbuka, tapi mungkin kurang memahami cara pendekatan ke orang Melayu. Kami lebih suka pendekatan lewat musyawarah yang lembut. Kalau cara bicara terlalu langsung, kadang warga merasa disepelekan. Jadi bukan tidak mendukung, hanya saja belum merasa pas.”

Tabel 1. Persepsi Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Berdasarkan Etnis

Etnis Warga	Persepsi Terhadap Kepala Desa	Keterlibatan dalam Musyawarah	Kepuasan terhadap Kebijakan Desa	Rasa Keterwakilan
Batak	Sangat Positif	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Jawa	Negatif	Rendah	Sedang	Rendah
Melayu	Netral– Cenderung Negatif	Sedang	Sedang	Rendah
Mandailing	Positif namun Kritis	Sedang	Tinggi	Sedang

Dari data di atas, terlihat bahwa representasi etnis dalam struktur kepemimpinan desa secara simbolik masih belum menyentuh kelompok minoritas seperti warga etnis Jawa dan Melayu. Ketiadaan aktor dari kelompok ini dalam struktur formal seperti perangkat desa, panitia kegiatan, atau BPD, turut menyumbang pada munculnya rasa tidak terwakili secara politik. Hal ini diperparah dengan bahasa komunikasi yang dominan menggunakan gaya langsung khas Batak, yang dalam beberapa konteks budaya Melayu dan Jawa dianggap kurang sopan atau kurang mengayomi.

Fenomena ini menguatkan gagasan Charles Taylor (1994) dalam *Politics of Recognition*, bahwa pengakuan identitas kelompok bukan hanya soal formalitas politik, tapi juga melibatkan

pengakuan simbolik dan budaya dalam ruang sosial publik. Selain itu, Parekh (2000) menyebutkan bahwa ketidakmampuan pemimpin untuk mengakomodasi ekspresi kultural lintas kelompok dapat berujung pada keterasingan simbolik (*symbolic exclusion*) dan ketegangan sosial yang berlarut-larut.

Riset oleh Setiawan et al. (2020) di masyarakat Bugis dan Toraja juga menemukan bahwa ketimpangan representasi dalam kepemimpinan lokal dapat menciptakan polarisasi sosial, terutama ketika distribusi bantuan atau peluang ekonomi dianggap tidak adil oleh kelompok minoritas. Hal ini serupa dengan kondisi di Desa Suka Mandi Hilir, di mana distribusi bantuan sosial dianggap tidak transparan dan cenderung berpihak kepada kelompok dominan secara etnis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala desa di Desa Suka Mandi Hilir belum sepenuhnya merepresentasikan keragaman etnis warganya secara setara. Kepemimpinan yang lebih inklusif dibutuhkan, dengan memperhatikan tidak hanya aspek administratif, tetapi juga simbolik dan komunikatif. Penyesuaian cara pendekatan dan peningkatan partisipasi kelompok minoritas dalam pengambilan keputusan desa menjadi langkah strategis yang harus diupayakan demi menghindari eksklusi sosial yang lebih luas.

2. Ketegangan Sosial saat Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa di Desa Suka Mandi Hilir menjadi momen krusial yang memunculkan potensi konflik sosial berbasis etnis. Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi, diketahui bahwa suasana sosial desa cenderung memanas setiap kali memasuki tahun pemilihan. Isu etnik kerap dijadikan bahan kampanye atau alat mobilisasi dukungan, baik secara terbuka maupun terselubung.

Informasi ini diperoleh dari hampir semua informan. Salah satunya disampaikan oleh Merry Siahaan:

“Waktu pemilihan kepala desa yang lalu, suasananya benar-benar panas. Banyak warga yang mulai bicara soal asal-usul calon. Ada yang bilang, ‘Kalau bukan orang Batak, jangan harap bisa menang.’ Saya dengar sendiri itu. Bahkan di pengajian, beberapa ibu juga saling sindir soal siapa yang mereka dukung. Ini bukan cuma beda pilihan, tapi jadi soal perbedaan suku.”

Kondisi serupa dikuatkan oleh pengakuan Ketua RT, Bapak Rudi Harahap:

“Saya sempat menengahi warga dari dua etnis yang saling tuding soal bantuan dan keberpihakan calon. Bahkan ada yang sampai enggan saling sapa setelah pemilu selesai. Ketika pemilihan, warga jadi lebih sensitif soal identitas. Ini berbeda dengan hari-hari biasa yang relatif damai.”

Fenomena ini menunjukkan bahwa struktur sosial desa yang tampak harmonis di permukaan bisa berubah menjadi terfragmentasi saat masyarakat harus memilih pemimpin. Identitas etnis menjadi lensa utama dalam menilai integritas, kapasitas, dan kelayakan seorang calon kepala desa. Hal ini menciptakan polarisasi sosial yang nyata, bahkan di antara tetangga yang sebelumnya hidup berdampingan secara damai.

Temuan ini sejalan dengan teori konflik sosial Lewis Coser (1956) yang menyatakan bahwa dalam masyarakat majemuk, konflik akan muncul bila identitas kolektif, seperti etnis, dimobilisasi untuk mencapai posisi kekuasaan atau akses terhadap sumber daya. Pemilihan kepala desa di Suka Mandi Hilir menjadi bukti konkret bagaimana proses demokratisasi dapat dibelokkan menjadi kontestasi identitas.

Penelitian Gunawan (2021) di Kalimantan Tengah menunjukkan gejala serupa, di mana pemilu kepala desa dijadikan alat untuk memperkuat identitas kesukuan dan melemahkan inklusi politik. Gunawan menyimpulkan bahwa “politik identitas di tingkat desa jauh lebih eksplosif karena hubungan antarindividu lebih personal dan langsung.” Temuan ini identik dengan kondisi

di Suka Mandi Hilir.

Kajian Nurdin (2021) di Lombok Timur menyatakan bahwa ketegangan sosial saat pemilihan kepala desa tidak hanya berdampak sementara, tetapi bisa meninggalkan luka sosial yang bertahan lama. Dalam beberapa kasus, hubungan antarwarga tidak pulih meskipun pemilihan telah usai. Temuan ini diperkuat dalam wawancara dengan Buk Rani:

“Setelah pemilihan, suasana kampung jadi agak canggung. Warga dari kelompok kami jadi jarang kumpul lagi di balai desa. Rasanya tidak dihargai. Bahkan, kami sering merasa tidak dilibatkan dalam kegiatan kampung.”

Tabel 3. Dampak Pemilu Kepala Desa terhadap Hubungan Sosial Antarwarga

Dampak Sosial	Frekuensi Terjadi	Etnis yang Paling Terpengaruh
Perpecahan antarwarga	Sering	Jawa, Melayu
Penurunan kehadiran di forum desa	Sedang	Jawa, Melayu
Tuduhan keberpihakan pemimpin	Sering	Semua etnis
Relasi sosial menjadi canggung	Tinggi	Semua etnis
Silaturahmi pascapemilu menurun	Sedang	Mandailing, Melayu

Hal ini mengungkap bahwa pemilihan kepala desa merupakan momen krusial yang meningkatkan kerentanan sosial dalam masyarakat majemuk. Isu-isu etnik yang tidak muncul dalam kehidupan sehari-hari menjadi dominan saat warga dihadapkan pada pilihan politik. Polarisasi yang muncul bersifat horizontal dan memecah solidaritas sosial yang telah terbangun.

Kondisi ini menunjukkan bahwa model kepemimpinan lokal yang inklusif, serta strategi pemilu yang bebas dari mobilisasi identitas primordial, sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial di tingkat desa. Perlu ada regulasi dan edukasi politik berbasis komunitas yang menekankan nilai persatuan dan pengakuan lintas budaya.

3. Strategi Kepala Desa dalam Meredam Ketegangan Etnik

Dalam masyarakat multietnik seperti Desa Suka Mandi Hilir, upaya untuk menjaga harmoni sosial tidak hanya bergantung pada aturan administratif, melainkan sangat ditentukan oleh strategi interpersonal dan kultural dari pemimpin lokal. Ketegangan sosial yang muncul akibat kompetisi politik berbasis etnik menuntut peran kepala desa untuk tampil sebagai penengah yang adil, komunikatif, dan inklusif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa Suka Mandi Hilir, Bapak Sihotang, menggunakan serangkaian pendekatan sosial-budaya untuk meredam potensi konflik antarwarga.

Dari wawancara mendalam, diketahui bahwa kepala desa secara rutin menyelenggarakan kegiatan sosial yang bersifat kolektif dan melibatkan lintas etnis, seperti gotong royong, peringatan hari besar nasional dan keagamaan, serta pengajian bersama. Hal ini diungkapkan oleh beliau dalam wawancara berikut:

“Saya tahu sendiri bahwa di sini orang dari suku yang berbeda punya cara pandang dan kebiasaan yang berbeda. Tapi saya percaya, kalau kita sering kumpul bareng dan saling bantu, lama-lama rasa curiga itu hilang. Makanya saya dorong terus kegiatan kayak gotong royong, acara makan bersama, pengajian ibu-ibu. Jangan sampai warga hanya berkumpul di

kelompoknya sendiri.”

Strategi ini mendapat respons positif dari beberapa warga, terutama yang merasa bahwa sebelumnya mereka terpinggirkan dalam forum desa. Ibu Aminah, tokoh pengajian dari etnis Melayu, menambahkan:

“Pak Kades memang sering hadir di pengajian kami, bahkan pernah bantu panitia. Itu membuat kami merasa dihargai. Beliau juga ajak warga dari suku lain untuk gabung, walaupun belum semua datang. Tapi setidaknya niat baik itu kelihatan.”

Tabel 4. Strategi Kepala Desa dalam Membangun Relasi Antar-Etnik

Strategi yang Diterapkan	Frekuensi Pelaksanaan	Kelompok yang Terlibat	Dampak Sosial
Gotong Royong Lintas Etnis	Bulanan	Semua etnis	Meningkatkan interaksi sosial
Acara Hari Besar Bersama (HUT RI, Maulid)	Tahunan	Batak, Melayu, Mandailing	Menciptakan suasana solidaritas
Pengajian Terbuka untuk Semua Etnis	Dua Minggu sekali	Melayu, Jawa, Batak	Ruang dialog spiritual
Diskusi Musyawarah Terbuka di Balai Desa	Insidental	Seluruh tokoh masyarakat	Mencegah isu provokatif
Pendekatan Personal ke Tokoh Minoritas	Saat isu memanas	Tokoh Melayu, Jawa	Menurunkan tensi emosi kolektif

Strategi yang diterapkan kepala desa ini mencerminkan pendekatan *intercultural competence* dalam kepemimpinan, sebagaimana dijelaskan oleh Deardorff (2006), bahwa dalam konteks masyarakat majemuk, pemimpin dituntut memiliki kemampuan untuk memahami, menghargai, dan mengelola perbedaan secara efektif. Pendekatan kultural dalam membangun kepercayaan sosial menjadi sangat penting dalam meredam konflik yang berasal dari prasangka atau stereotip.

Penelitian oleh Siregar (2019) di Desa Huta Raja menunjukkan bahwa forum komunikasi informal, seperti arisan dan pengajian, merupakan ruang strategis untuk mencegah konflik di masyarakat majemuk. Demikian pula, studi Yulianto dan Hardiansyah (2020) menekankan bahwa pertemuan lintas etnis yang difasilitasi oleh tokoh sentral desa dapat mempercepat rekonsiliasi sosial setelah pemilu.

Temuan ini juga didukung oleh rumusan UNDP (2021) dalam laporan *Community-Based Conflict Resolution*, yang menyatakan bahwa pemimpin lokal harus berfungsi sebagai fasilitator dialog horizontal dan pengelola ruang sosial yang inklusif, bukan sekadar pengatur anggaran dan administrasi.

Namun demikian, efektivitas strategi ini masih dibatasi oleh partisipasi pasif dari kelompok minoritas tertentu yang merasa trauma atau skeptis setelah pengalaman pemilu yang penuh konflik. Ini mengindikasikan bahwa strategi partisipatif harus disertai dengan *pendekatan afirmatif* untuk memastikan bahwa seluruh warga merasa memiliki ruang sosial yang setara.

4. Peran Tokoh Agama dan Ibu-Ibu Pengajian dalam Mendinginkan Suasana

Dalam masyarakat majemuk yang rentan mengalami gesekan etnik seperti Desa Suka Mandi Hilir, peran informal sering kali lebih efektif dibanding pendekatan birokratik dalam menjaga harmoni sosial. Penelitian ini menemukan bahwa salah satu aktor non-pemerintahan yang berpengaruh besar dalam meredam ketegangan sosial adalah kelompok pengajian ibu-ibu dan tokoh agama lokal.

Ibu Aminah, seorang tokoh pengajian dari etnis Melayu yang telah aktif selama lebih dari dua dekade, menjelaskan bahwa forum pengajian bukan hanya ruang ibadah, tetapi juga media silaturahmi, dialog sosial, bahkan penyelesaian konflik kecil secara tidak langsung. Dalam wawancara, ia mengungkapkan:

“Di pengajian, kami tidak bicara politik secara langsung. Tapi kami tahu bahwa banyak keresahan yang terbawa dari luar, terutama saat pemilihan desa. Kami jadikan pengajian sebagai tempat menenangkan hati. Kadang ibu-ibu cerita sambil menangis, merasa tidak dianggap karena sukunya. Dari situ kami beri nasihat dan saling rangkul. Ini lebih ampuh daripada debat di rapat kampung.”

Pengajian terbuka ini secara rutin dihadiri oleh ibu-ibu dari etnis Jawa, Batak, dan Mandailing. Forum ini menjadi oase sosial yang inklusif, terutama bagi perempuan yang sebelumnya merasa tidak memiliki ruang untuk menyuarakan perasaan dan keluhan. Strategi ini bekerja secara halus, menciptakan *healing space* yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai spiritual serta kearifan lokal.

Bapak Rudi Harahap, Ketua RT dari etnis Mandailing, juga mengakui bahwa ketegangan sosial antarwarga justru mereda lebih cepat ketika didekati melalui jaringan ibu-ibu pengajian. Ia menyatakan:

“Kalau kami yang laki-laki kadang gengsi minta maaf. Tapi ibu-ibu di pengajian sering jadi jembatan. Mereka menyampaikan keresahan, lalu menghubungkan keluarga yang sempat berselisih. Diam-diam suasana cair lagi. Saya pikir inilah kekuatan dari peran agama dan budaya kita.”

Tabel 5. Peran Sosial Pengajian dalam Membangun Rekonsiliasi Komunitas

Fungsi Pengajian	Bentuk Aktivitas Konkret	Dampak terhadap Ketegangan Sosial
Ruang curhat dan dialog non-formal	Diskusi bebas setelah kajian	Reduksi prasangka antar-etnis
Media silaturahmi lintas identitas	Undangan terbuka ke semua etnis	Peningkatan solidaritas komunitas
Kanal penyebaran nilai toleransi	Ceramah agama tentang persaudaraan	Pencegahan retorika provokatif
Penengah konflik antarwarga	Ibu-ibu menyampaikan pesan damai	Rekonsiliasi keluarga yang berselisih
Pelibatan tokoh agama semua etnis	Mengundang ustaz dari berbagai latar	Penguatan kepercayaan bersama

Temuan ini sejalan dengan konsep *social healing* dalam teori perdamaian John Paul Lederach (1997), yang menyatakan bahwa perdamaian yang berkelanjutan lahir dari proses rekonsiliasi akar rumput yang berbasis pada budaya dan nilai spiritual masyarakat. Kegiatan pengajian di Suka Mandi Hilir merefleksikan pendekatan ini secara nyata dan kontekstual.

Penelitian Kurniawati et al. (2022) di Kabupaten Bogor juga menunjukkan bahwa pengajian ibu-ibu merupakan instrumen yang efektif untuk meredam polarisasi sosial pasca

konflik politik. Forum tersebut terbukti dapat memperkuat empati, mengembalikan komunikasi antarwarga, serta memutus rantai prasangka kolektif yang terbentuk akibat kontestasi politik.

Demikian pula, studi internasional oleh Lems et al. (2019) dalam konteks komunitas migran di Austria menunjukkan bahwa kelompok keagamaan informal seperti majelis taklim atau kelompok doa memiliki kekuatan sosial untuk membangun inklusi dan memperluas jaringan kepercayaan antaridentitas. Dalam konteks ini, spiritualitas menjadi pendekatan *soft power* yang melampaui batasan politik dan birokrasi.

Namun demikian, efektivitas forum pengajian sangat tergantung pada kepemimpinan internal dan keterbukaan lintas etnis. Di beberapa kesempatan, partisipasi dari etnis tertentu—seperti warga muda dari etnis Jawa—masih rendah karena dianggap kegiatan "untuk ibu-ibu tua" atau hanya milik kelompok tertentu. Oleh karena itu, perlu adanya revitalisasi peran pengajian agar lebih inklusif secara generasi dan budaya.

5. Pola Komunikasi dan Eksklusi Sosial dalam Forum Warga

Dalam sistem demokrasi lokal, forum warga desa seperti musyawarah kampung atau rapat dusun seharusnya menjadi ruang deliberatif di mana seluruh warga dapat menyampaikan aspirasi, usulan, atau keberatan secara setara. Namun, di Desa Suka Mandi Hilir, hasil penelitian menunjukkan adanya pola komunikasi yang tidak setara dan cenderung eksklusif berdasarkan identitas etnis. Hal ini menjadi sumber ketegangan sosial yang bersifat laten dan tidak selalu tampak secara kasatmata.

Berdasarkan wawancara dengan Buk Rani, warga senior dari etnis Jawa, diketahui bahwa dalam banyak forum desa, terdapat kecenderungan dominasi diskusi oleh warga dari etnis mayoritas. Ia menyatakan:

“Kalau rapat desa, biasanya yang bicara itu ya orang Batak saja. Mereka suaranya keras dan langsung ke inti. Kami dari Jawa biasanya cuma dengar saja, kadang takut kalau pendapat kita nanti dianggap salah. Saya pernah sekali sampaikan usulan soal kegiatan RW, malah dibilang ‘itu gak penting’. Sejak itu saya malas bicara.”

Sementara itu, Ibu Aminah menambahkan:

“Bahasa juga jadi kendala. Kami orang Melayu, biasa pakai bahasa yang halus dan kadang berputar. Tapi di rapat, yang keras dan langsung malah dianggap lebih benar. Akhirnya kami cuma hadir, tapi tidak bicara.”

Kondisi ini menunjukkan bahwa eksklusi sosial dalam forum warga bukan hanya soal siapa yang hadir atau tidak, tetapi juga siapa yang merasa berdaya untuk bicara. Pola komunikasi yang dominan—dalam hal gaya bahasa, intonasi, dan struktur penyampaian—menjadi batas simbolik antara yang ‘aktif’ dan ‘diam’.

Tabel 5. Bentuk Eksklusi Sosial yang Terjadi dalam Forum Warga

Bentuk Sosial	Eksklusi	Kelompok yang Terkena Dampak	Frekuensi Terjadi	Dampak Sosial
Dominasi percakapan oleh satu etnis		Jawa, Melayu	Sering	Hilangnya minat berpartisipasi
Tidak dihargainya pendapat minoritas		Jawa	Sedang	Penarikan diri dari forum publik
Ketidaksesuaian gaya komunikasi		Melayu, Mandailing	Sedang	Ketegangan simbolik

Pengabaian terhadap usulan minoritas	Jawa, Melayu	Sedang	Ketidakpercayaan pada sistem desa
--------------------------------------	--------------	--------	-----------------------------------

Temuan ini memperkuat teori *symbolic violence* dari Pierre Bourdieu (1991), yang menyatakan bahwa dominasi tidak hanya terjadi secara fisik atau ekonomi, tetapi juga melalui simbol—dalam hal ini, gaya komunikasi dan struktur forum. Warga dari kelompok minoritas yang tidak memiliki habitus dominan merasa tidak cukup “pantas” atau “berhak” untuk berbicara, meskipun secara formal mereka memiliki hak yang sama.

Kajian Mahyuddin (2019) di komunitas etnik Bali menunjukkan fenomena serupa, di mana warga dari kelompok minoritas menginternalisasi posisi subordinat dalam forum publik karena perbedaan ekspresi budaya dan retorika. Mereka lebih memilih diam demi menjaga keharmonisan, yang pada akhirnya justru menciptakan ketimpangan komunikasi struktural.

Penelitian Rumata (2020) di Papua juga menemukan bahwa eksklusi dalam forum warga menciptakan rasa frustrasi kolektif yang menjadi dasar kemarahan terselubung. Hal ini dapat meledak sewaktu-waktu apabila dipicu oleh isu-isu politik atau kebijakan yang dianggap diskriminatif.

Sementara itu, studi Taylor (1994) dalam *Politics of Recognition* menyatakan bahwa pengakuan tidak cukup hanya dalam bentuk kehadiran fisik, tetapi harus disertai dengan pengakuan ekspresif dan simbolik. Artinya, warga desa tidak hanya perlu diberi kesempatan untuk hadir, tetapi juga diberi ruang dan dukungan untuk menyuarakan pandangan dengan cara mereka sendiri.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan etnik di Desa Suka Mandi Hilir memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika sosial warga, khususnya dalam membentuk relasi antar kelompok etnis. Representasi etnis dalam struktur kekuasaan mempengaruhi persepsi keadilan sosial dan rasa keterlibatan warga, di mana kelompok mayoritas merasa lebih terakomodasi dibandingkan kelompok minoritas. Ketegangan sosial cenderung meningkat pada momen politik, terutama saat pemilihan kepala desa, ketika identitas etnis dimobilisasi untuk kepentingan elektoral.

Meski demikian, kepala desa telah berupaya menerapkan strategi partisipatif dan kegiatan lintas etnis untuk membangun kohesi sosial, meskipun hasilnya belum merata. Peran informal, seperti pengajian ibu-ibu dan tokoh agama, terbukti lebih efektif dalam mendekatkan warga dan mengurangi prasangka etnik. Namun demikian, forum-forum resmi desa masih menunjukkan pola komunikasi yang eksklusif dan belum ramah terhadap keberagaman gaya bicara, yang memperkuat eksklusi simbolik bagi kelompok tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan kepemimpinan yang lebih inklusif secara budaya dan simbolik, peningkatan kapasitas komunikasi antarbudaya dalam forum warga, serta penguatan peran sosial keagamaan sebagai ruang rekonsiliasi. Membangun keadilan sosial di desa multietnis bukan hanya soal distribusi sumber daya, tetapi pengakuan yang setara terhadap identitas dan partisipasi setiap warga.

DAFTAR REFERENSI

Arwati, I., & Saragih, R. B. (2022). Upaya adaptasi dan kesetaraan etnik Banyumas dengan etnik Rejang di Kecamatan Arga Makmur. *Kaganga: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 6(1),

71–80.

- Aryati, A., Mirka, D. B., Ramdhani, A., & Sofyan, A. (2024). Memperkuat ikatan sosial antar suku dan solusi untuk ketidakaktifan remaja desa Niur. *Mestaka: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(4), 386–390.
- Creswell, J. W. (2012). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gata, I. W. (2022). Pola interaksi keberagaman masyarakat multikultur di Desa Pengastulan. *Satya Widya: Jurnal Studi Agama*, 5(1), 60–73.
- Hardani, D. (2020). *Buku metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Hendry, A. (2021). Integrasi sosial dalam masyarakat multi etnik. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(1).
- Jers, L. O. T., Efriani, E., Nurti, Y., & Rinaldi, R. (2023). Mekambare as a former of social solidarity in the Tolaki community. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 25(2), 163–172.
- Koentjaraningrat. (2009). *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kurniawati, I., Hidayah, R., & Sulastri, A. (2022). Peran tokoh agama dalam rekonsiliasi atas konflik sosial. *Jurnal Bimas Islam*, 20(1), 45–58.
- Mahyuddin, R. (2019). Kesetaraan simbolik dalam ruang publik desa. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(2), 221–236.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muliani. (2023). Interaksi sosial antaretnik Mandailing–Jawa di Desa Pasar Singkuang II. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(2).
- Nurdin, F., & Fazal, K. (2022). Fungsi dan makna tradisi Reuhab di Gampong Kuta Aceh. *Jurnal Sosiologi USK*, 16(2).
- Setiawan, H. (2020). Relasi politik-ekonomi masyarakat desa adat di Riau. *JSSH: Jurnal Sains Sosial dan Humaniora*, 4(1), 1–11.
- Simarmata, M. A. (2021). Kepemimpinan desa dalam mengelola konflik etnik di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 8(2), 134–148.
- Siregar, V. T., & Hardiansyah, E. (2020). Forum lintas etnis sebagai upaya rekonsiliasi sosial di desa multikultur. *Jurnal Komunikasi dan Penyuluhan*, 18(3), 105–118.
- Soejono, N., & Kosasih, A. (2021). Pola hubungan sosial masyarakat multikultural di Pontianak. *IDEAS: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(1), 9–16.
- Sudi, M. (2020). Integrasi sosial dalam kehidupan antaretnik di Biak. *Gema Kampus IISIP Yapis Biak*, 15(1), 59–71.
- Suprayogo, I., & Tabroni, H. (2022). Pola interaksi keberagaman masyarakat multikultur di Seririt. *Satya Widya: Jurnal Studi Agama*, 5(1), 60–73.
- Yukl, G. (2012). *Leadership in organizations (Terj.)*. Jakarta: PT Indeks.